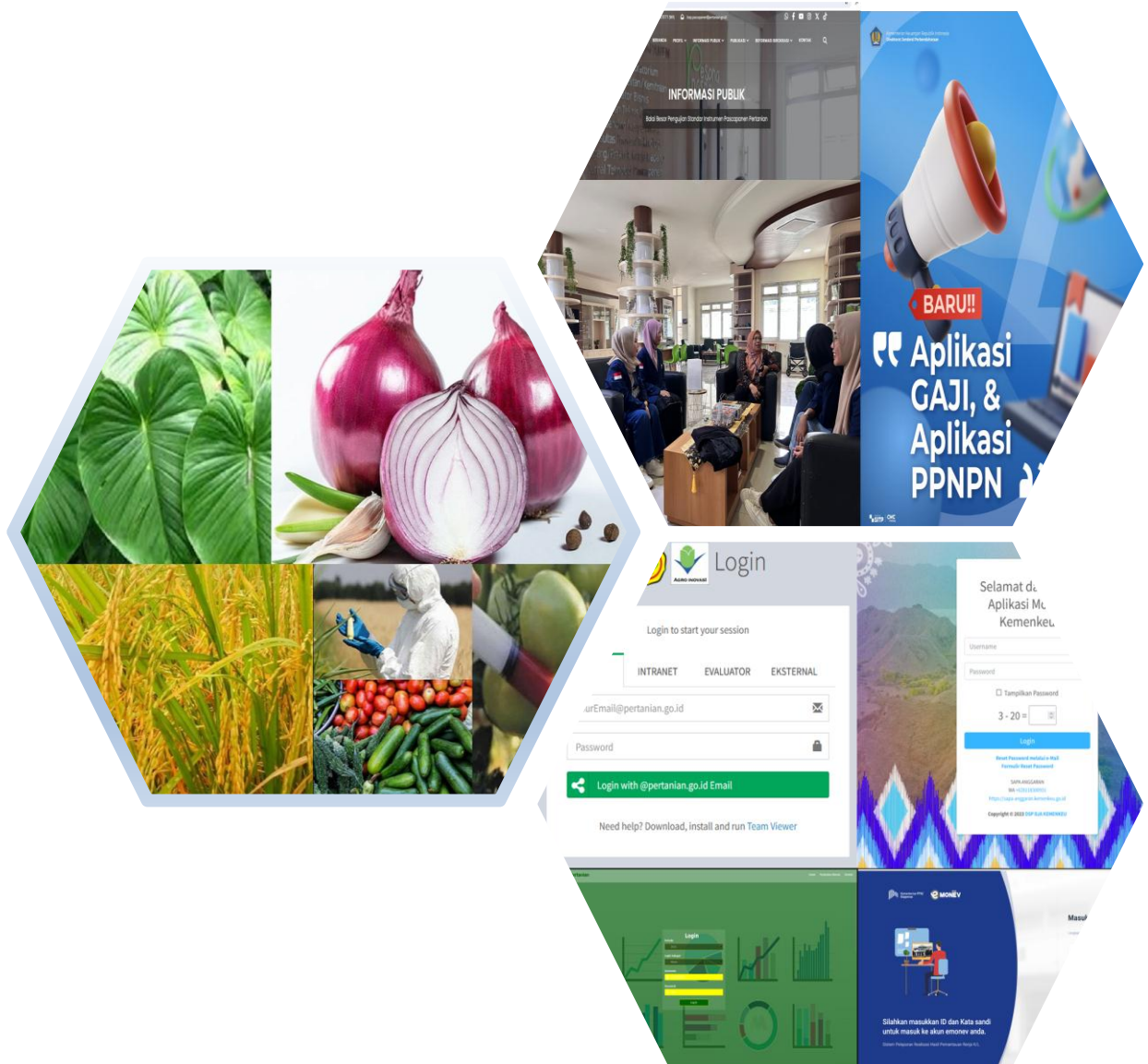


2024

# LAPORAN TRIWULAN II



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Monitoring Triwulan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian), merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring triwulan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran.

Laporan triwulan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Bogor, 5 Juli 2024

Kepala Balai Besar Pengujian Standar  
Instrumen Pascapanen Pertanian



*Dr. Asmarhansyah, S.P., M.Sc.*  
NIP 197102241998031002

## DAFTAR ISI

<b>KATAPENGANTAR</b>	.....
<b>DAFTAR ISI</b>	.....
<b>BAB I</b>	.....
<b>PENDAHULUAN</b>	.....
1.1 Tujuan	.....
1.2 Sasaran	.....
<b>BAB II</b>	.....
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....
2.1 Capaian Kinerja	.....
2.2 Permasalahan dan Upaya Pemecahannya	.....
<b>BAB III</b>	.....
<b>KEGIATAN STRATEGIS</b>	.....
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	.....
3.1.1 Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	.....
3.1.2 Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian	.....
3.1.3 Layanan Pengujian Mutu Instrumen Pascapanen Pertanian	.....
3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	.....
<b>BAB IV</b>	.....
<b>KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	.....
4.1 Evaluasi Aplikasi Monev Online	.....
4.1.1 Aplikasi SMART-DJA	.....
4.1.2 Aplikasi e-monev Bappenas	.....
4.1.3 Aplikasi e-monev BSIP	.....
4.1.4 Aplikasi e-sakip Kementan	.....
4.1.5 Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran)	.....
4.2 Evaluasi Kegiatan Manajemen Kinerja Internal:	.....
4.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	.....
<b>BAB V</b>	.....
<b>KESIMPULAN DAN PENUTUP</b>	.....
5.1 Kesimpulan	.....
5.2 Saran	.....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Balai Besar Pengujian Standardisasi Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) merupakan salah satu Unit Kerja dari BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian), sesuai dengan PERMENTAN 13/2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian, dengan Fungsi: a) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; b) Pelaksanaan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; c) Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian; d) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian; e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan Rumah tangga BBPSI Pascapanen Pertanian. Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, pada tahun 2024 BBPSI Pascapanen memiliki beberapa kegiatan strategis mendukung program nilai tambah dan daya saing industri, yaitu:

- 1) Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, terdiri dari:
  - a. Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dengan target output 4 standar, mencakup: 1) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (Revisi SNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian); 2) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi); 3) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Susut padi); 4) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng); 5) Persiapan Lembaga Sertifikasi Produk, Jasa, Proses (LSPro); 6) Pengelolaan Komisi Teknis SNI dan CODEX; dan 7) Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian.
  - b. Instrumen mutu pascapanen pertanian yang diuji dengan target output 60 produk. Kegiatan ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan laboratorium.

- 2) Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian, terdiri dari:
- a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan target output 4 layanan, mencakup: 1) Layanan BMN (Pelaksanaan Pengelolaan BMN, Pengelolaan Barang Milik Negara); 2) Layanan Hubungan Masyarakat (Pendampingan Dukungan Penas); 3) Layanan Umum (Layanan Kerumahtanggaan dan Umum: Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal dan Layanan Informasi Publik, Layanan Pengelolaan PNBP: Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium); 4) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan; Operasional dan Pemeliharaan Kantor: Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, dan Pemeliharaan Kantor; dan Pembayaran Terkait Operasional Kantor).
  - b. Layanan Manajemen SDM Internal dengan target output 88 orang, mencakup: Pengelolaan Manajemen Kepegawaian (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian).
  - c. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan target output 3 layanan, mencakup: 1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan Rencana Program dan Anggaran: Perencanaan Program dan Anggaran, Koordinasi Instusional); 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi); 3) Layanan Manajemen Keuangan (Pengelolaan Keuangan: Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan, dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran).

### **1.1 Tujuan**

BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki visi: "Menjadi unit pelaksana teknis yang akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam standardisasi instrumen pascapanen mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki misi: melaksanakan kegiatan standardisasi instrumen pascapanen pertanian mendukung program peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian.

## 1.2 Sasaran

Dalam mewujudkan visi misinya tersebut, BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja, yaitu:

- 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Standar.
- 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82 (Nilai)
- 3) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai).

## **BAB II AKUNTABILITAS KINERJA**

### **2.1. Capaian Kinerja**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2024, terdapat 3 IKSK (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan) di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung pencapaian IKSP (Indikator Kinerja Sasaran Program) BSIP. Berdasarkan Renaksi yang telah disusun di lingkup BSIP, BSIP memiliki sasaran program pertama (SP1) berupa Meningkatnya daya saing komoditas pertanian, dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP): Persentase penerapan standar instrumen pertanian, terdiri dari:

a) Data SNI yang sudah diterapkan oleh pengguna, b) Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan RSNI di BSIP. Pada SP1 ini, sesuai PK BBPSI Pascapanen Pertanian yang memiliki sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Standar, maka BBPSI Pascapanen Pertanian hanya berkontribusi pada IKSP kedua, yaitu Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan RSNI di BSIP.

BBPSI Pascapanen Pertanian juga berkontribusi pada capaian IKSP3 BSIP, yang memiliki SP3 berupa 'Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima' dengan indikator kinerja sasaran kegiatan di BSIP adalah Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Adapun capaian keberhasilan indikator tersebut sampai dengan bulan Juni 2024 adalah sebagai berikut: a) Persiapan: koordinasi dengan pihak terkait dalam hal persiapan pengumpulan eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BSIP; b) Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BSIP sebesar 65%.

Sasaran Kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung SP3 BSIP: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82.

Sasaran Kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung SP4 BSIP:

Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai).

## **2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya**

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya:

- Adanya pemblokiran anggaran dan Automatic Adjustment (AA)
- Rendahnya serapan anggaran tiap kegiatan

Adapun beberapa upaya pemecahan permasalahan diatas diantaranya:

- Pemacuan serapan anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan efisiensi ataupun anggaran yang tersedia.
- Diadakan rapat intensif dan Penguatan tim untuk berkoordinasi dengan komtek secara lebih intens.
- Mempercepat kegiatan secara internal, serta kegiatan dilaksanakan mengikuti agenda BSIP.



## **BAB III KEGIATAN STRATEGIS**

### **3.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp 7.771.300.882,00 (43,88%) dengan capaian fisik sebesar 45,75%. Berikut adalah capaian kinerja dari kegiatan teknis di BBPSI Pascapanen Pertanian.

#### **3.1.1 Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan**

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar 61.884.500,00 (7,74%) dengan capaian fisik sebesar 51,25%, dengan perkembangan per kegiatan sebagai berikut:

i) *RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng*

Realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar 35%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Rapat internal tim, penyusunan proposal, SOP Penanganan Pasca Panen Daun Rajang Kering Talas Beneng yang telah disusun oleh BSIP Banten akan digunakan sebagai acuan penyusunan RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng. Pada waktu sebelumnya juga telah dilakukan FGD dengan BSIP banten untuk menjaring informasi dan kondisi eksiting komoditas daun talas beneng kering
- Kunjungan lapang ke Unni Talas Beneng di Serang Banten pada tanggal 4 Maret 2024, Kegiatan dilakukan untuk mengamati proses produksi daun rajangan yang akan digunakan sebagai dasar acuan penyusunan RSNI daun rajangan Talas Beneng berasal dari sejumlah sumber referensi dan kajian di lapangan. Bentuk RSNI yang akan disusun merupakan RSNI proses yang masuk pada Ruang lingkup Komtek 65-22 Pascapanen.



Gambar 1. Daun rajangan talas beneng

- Diskusi dan koordinasi dengan Balai Penerapan Standar Instrumen Banten (BSIP Banten) untuk penyusunan RSNI Daun Rajangan kering Talas beneng
- BBPSI Pascapanen Pertanian telah Menyusun draf RSNI tersebut mengacu pada SOP yang telah disusun tim BSIP Banten dan hasil kunjungan lang ke Unni Talas Beneng. Diskusi dilakukan secara offline dan online pada tanggal 27 Maret 2024. Draft RSNI ini akan dibahas lebih lanjut pada tanggal 24 April 2024
- SOP Penanganan Pasca Panen Daun Rajang Kering Talas Beneng yang telah disusun oleh BSIP Banten akan digunakan sebagai acuan penyusunan RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng. Pada waktu sebelumnya juga telah dilakukan FGD dengan BSIP Banten untuk menjaring informasi dan kondisi eksiting komoditas daun talas beneng kering.
- Finalisasi draft konsep RSNI sebagai persiapan untuk Rapat Teknis. Sebelumnya tim kanseptor RSNI Daun Rajangan Kering Talas Beneng BBPSI Pascapanen telah berdiskusi dan koordinasi dengan anggota komtek dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN, tim kanseptor dari BPSIP Banten dan BPPSI Pascapanen. Adapun finalisasi konsep RSNI berupa kelengkapan data dukung antara lain:
  - Dokumentasi (foto/gambar) untuk lampiran
  - Cara uji organoleptik, yaitu aroma diklasifikasikan berdasarkan

kesegaran, keharuman, kehalusan.

- Cara uji warna dan hasil analisa, warna diklasifikasikan berdasarkan kuning keemasan, kuning kehijauan, Kkning kecoklatan, dominan coklat.
- Cara uji kadar air berdasarkan pada metode kadar air diuji sesuai ISO 1666:1996



Gambar 2. Rapat internal tim

ii) *RSNI Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi*

Realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar 50%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Draft RSNI, Penyusunan draft RSNI dilaksanakan melalui koordinasi dan diskusi yang diikuti oleh seluruh anggota tim
- Verifikasi lapang terkait transportasi dan distribusi bawang merah  
Verifikasi kegiatan transportasi dan distribusi bawang merah dilaksanakan di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta meliputi kegiatan pengangkutan (transportasi), penanganan bawang merah di pasar, dan keragaan bawang merah.
- Penyusunan draft RSNI dilaksanakan melalui koordinasi dan diskusi yang diikuti oleh seluruh anggota Tim.
- Survey dan pengumpulan data proses penanganan pascapanen bawang merah di Tingkat eksportir sebagai bahan penyusunan RSNI yang berjudul "Penanganan Pascapanen Bawang Merah Konsumsi" ke PT. Benama Agromakmur yang beralamat di Komplek Ruko Pegambiran Estate Blok A.26

## Cirebon-Jawa Barat



Gambar 3. Verifikasi lapang transportasi dan distribusi bawang merah

- Verifikasi Prosedur Penanganan Pascapanen Bawang Merah di Tingkat Eksportir

Pada tanggal 20-21 Juni 2024 telah dilakukan survey dan pengumpulan data proses penanganan pascapanen bawang merah di Tingkat eksportir. PT. Benama mengambil bahan baku bawang merah dari Bima-NTB untuk varietas Superphilip dan Majalengka untuk varietas Vietnam. Ciri ciri bawang merah yang diekspor adalah berumbi besar. Perusahaan ini tidak mengambil bahan baku dari Cirebon karena alasan ukuran umbi yang tidak memenuhi permintaan negara importir. Kriteria bawang merah yang diekspor masih mengacu pada diameter saja, belum mengacu terhadap kandungan kimia dan cemarannya, karena negara tujuan memang belum mempersyaratkan hal tersebut kecuali Thailand yang mempersyaratkan mengenai standar proses GMP. Sehingga berdasarkan informasi bawang merah yang diekspor belum dilakukan analisis laboratorium untuk mengetahui mutu fisik dan kimiawinya.

Selain melakukan konfirmasi penanganan pascapanen bawang merah, dilakukan juga sampling terhadap bawang merah Super phillip yang digunakan oleh eksportir. Sampel tersebut selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut terkait residu pestisida dan logam berat (Pb).



Gambar 4. Proses penanganan pascapanen bawang merah



Gambar 5. Sampel Bawang Merah

iii) *RSNI Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi*

Realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sekitar 70%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Dinas Pertanian Karawang dan BBPSI Mekanisasi Pertanian
- Rapat internal untuk validasi perhitungan nilai susut pascapanen padi pada tahap panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan dan penyusunan draf RSNI 1
  - Perhitungan data hasil validasi menggunakan rumus yang ada
  - Pembahasan mengenai prinsip dan cara pengukuran masing-masing tahap pascapanen
  - Pembahasan format draf RSNI1 metode pengukuran susut pascapanen padi
- Rapat tim konseptor RSNI Susut Pascapanen Padi
  - Pembahasan mengenai konsep pengukuran susut pascapanen padi berdasarkan hasil validasi

- Pembahasan mengenai konsep pengukuran susut pascapanen padi yang sudah disusun menjadi RSNI1



Gambar 6. Koordinasi dengan instansi terkait

- Melaksanakan Rapat internal untuk validasi perhitungan nilai susut pascapanen padi pada tahap panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan dan penyusunan draf RSNI 1
  - Perhitungan data hasil validasi menggunakan rumus yang ada
  - Pembahasan mengenai prinsip dan cara pengukuran masing-masing tahap pascapanen
  - Pembahasan mengenai format draf RSNI1 metode pengukuran susut pascapanen padi



Gambar 7. Rapat Internal penyusunan draft RSNI 1

- Rapat tim konseptor RSNI Susut Pascapanen Padi
  - Pembahasan mengenai konsep pengukuran susut pascapanen padi berdasarkan hasil validasi
  - Pembahasan mengenai konsep pengukuran susut pascapanen padi yang sudah disusun menjadi RSNI1



Gambar 8. Rapat tim konseptor

iv) *Revisi SNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian*

Realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sekitar 50%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Balingtan pada tanggal 21 Februari 2024 dengan menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya adalah bahwa Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian akan fokus di Komtek 65-24 dengan output 2 RSNI, namun tetap memprioritaskan untuk penyelesaian output RSNI 1 Revisi SNI BMR, serta



Penyusunan Draft Revisi SNI BMR Pestisida

Gambar 9. Rapat koordinasi dengan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

- Telah dilaksanakan perhitungan paparan pestisida untuk 292 bahan aktif yang terdiri dari 7197 komoditas, menghasilkan nilai paparan yang menunjukkan bahwa MRL yang akan diadopsi dari Codex, ASEAN, dan Australia merupakan batas aman untuk di konsumsi oleh masyarakat Indonesia, ada beberapa bahan aktif dengan nilai paparan yang melebihi 100 persen sehingga menunjukkan bahwa MRL yang akan diadopsi tidak sesuai dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia;
  - Tim Konseptor SNI BMR Residu pestisida telah melaksanakan perhitungan risiko paparan residu pestisida menggunakan kalkulator IEDI dan telah melakukan pengecekan silang. Hasil perhitungan tersebut menghasilkan beberapa bahan aktif yang nilai ADInya melebihi 100 persen sehingga diduga bahwa batas maksimum yang akan diadopsi tidak sesuai dengan pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut maka tim melaksanakan diskusi dengan narasumber Prof. Dadang dari Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor yang juga merupakan Ketua Komisi Pestisida. Dari hasil diskusi dan paparan dari Prof. Dadang maka tim akan mengecek silang kembali perhitungan IEDI calculator dan akan membawa hasil ke Crop Life yang memiliki ahli terkait perhitungan tersebut.
- v) *Penguatan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pascapanen Pertanian*

Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp39.954.200,- (15,98%) dan realisasi fisik sekitar 50%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi internal persiapan pelaksanaan asesmen akreditasi  
Kegiatan koordinasi internal dalam rangka persiapan pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan pada tgl 5 sd 7 Februari 2024. Kegiatan dilakukan untuk melakukan inventarisasi pelaksanaan kegiatan akreditasi dan pembagian tugas mock up audit yang telah diberikan oleh tim asesor.



- Asesmen akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Asesmen akreditasi LPH dilakukan oleh tim dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan anggota tim asesor tiga orang, yang terdiri atas dua asesor teknis dan satu asesor syariah. Asesor yang melakukan asesmen akreditasi LPH antara lain Amar Bramantiyo (Asesor Teknis – Lead asesor); Dias Indrasti (Asesor Teknis); Muhammad Djamaluddin (Asesor Syariah); Fitriah Setia Rini dan Ari Setianingsih (Sekretariat BPJPH). Asesmen yang dilaksanakan ini mengacu kepada SNI dan ISO 17065, selain itu juga mengacu pada peraturan badan jaminan produk halal no. 1 tahun 2023.



Gambar 10. Asesmen akreditasi LPH

- Diskusi dan konsultasi dengan Komisi Fatwa MUI, Kegiatan diskusi dan konsultasi dengan Komisi Fatwa (KF) MUI DKI dilakukan dalam rangka untuk konsolidasi terkait kebutuhan fasilitasi sidang komisi fatwa Mui yang dilakukan oleh KF MUI DKI;
- Diskusi dan konsolidasi eksternal LPH, Konsolidasi eksternal dilakukan dengan menghadiri penugasan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH Batch 1 yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag;  
Konsolidasi eksternal dilakukan dengan menghadiri penugasan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH Batch 1 yang diselenggarakan oleh

Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag di Jakarta pada tanggal 3-5 Juni 2024, dengan tema tema Rakornas adalah Strategi Peningkatan Kehalalan Produk. Tujuan Rakornas Batch 1: evaluasi capaian kinerja LPH baru terkait pemeriksaan kehalalan produk terutama menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi Halal (SH) pada 17 Oktober 2024. Hasil Rakornas diharapkan ada komitmen masing-masing LPH untuk peningkatan kinerja LPH.



Gambar 11. Rakornas LPH Batch 1

- Penjajakan dan pendampingan calon klien LSPro, Kegiatan pendampingan calon klien LSPro yang dilakukan oleh tim dokumen yang ditugaskan telah melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu Pelaku usaha Penggilingan padi sebagai calon klien, saat ini Pelaku usaha sedang melengkapi kebutuhana terkait kelengkapan dokumen mutu yang harus dilengkapi untuk kebutuhan sertifikasi;
- Audit halal ke Pelaku Usaha jasa Penjualan, LPH BBPSI Pascapanen Pertanian telah 3 kali melakukan audit pemeriksaan halal dalam rangka sertifikasi halal yang diajukan oleh Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Unggas (TPU) antara lain CV Fadilah, Ciseeng Kabupaten Bogor; CV Sukro Group, Pondok Gede, Bekasi dan PT Mustapa Jaya Mandiri, Bojong Gede Kabupaten Bogor, Kegiatan pemeriksaan halal dilakukan selama 1 hari, dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dimiliki

pelaku usaha, dokumen surat ijin berusaha (NIB), dokumen juru sembelih halal (juleha), dokumen penyelia halal, dokumen lainnya terkait implementasi SJPH di pelaku Usaha. Selain itu dilakukan kegiatan kunjungan verifikasi lapangan proses penyembelihan dan implementasi SJPH di RPU/TPU tersebut.

- Mengikuti pelatihan Juru sembelih halal

Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) telah diikuti pada tanggal 19 dan 21 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh Halal Science Center IPB University. Pelatihan dilakukan secara hybrid, daring dan luring. Pelaksanaan pelatihan pada tanggal 19 Februari (online) dan 21 Februari 2024 (offline). Pada pelatihan secara luring dilakukan di Halal Science Center IPB University dan dilanjutkan praktek di RPH Tapos Depok.



Gambar 12. Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)

- Memperbaiki form ketidaksesuaian proses asesmen LPH

Perbaikan dari hasil temuan ketidaksesuaian telah selesai dilakukan dan telah dilakukan pengiriman dokumen pendukungnya sesuai dengan hasil temuan ketidak sesuaian. Terdapat 14 temuan ketidaksesuaian (minor) dan 7 ketidaksesuaian (observasi).

- Melakukan diskusi dan koordinasi system integrasi dengan tim IT BPJPH dan BSIP

Untuk menjadi LPH yang terakreditasi, salah satu persyaratannya adalah mengintegrasikan sistem Informasi Halal (Sihalal) BPJPH dengan website yang dibangun oleh LPH BBPSI Pascapanen Pertanian. Hasil kegiatan

diskusi dan koordinasi serta konsultasi terkait integrasi sistem registrasi halal LPH ke dalam Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH dengan Bapak Nurhanudin selaku Ketua Tim Layanan Sistem Informasi BPJPH dan Bapak Rizki selaku Tim IT BPJPH yaitu sebagai berikut :

- a) LPH wajib memiliki sistem aplikasi untuk diintegrasikan dengan aplikasi sihalal
- b) Proses integrasi dapat dilakukan secara paralel dengan assessment
- c) Aplikasi LPH bisa juga diletakkan dalam website BBPSI Pascapanen Pertanian
- d) Aplikasi LPH khusus dioperasikan untuk admin LPH
- e) BPJPH memberikan akses melalui script endpoint berbasis API dan JSON, tanpa menyediakan CMS, sehingga CMS harus dibuat sendiri oleh BBPSI Pascapanen Pertanian. Contoh implementasi dilihat pada website berikut : <https://test.halal.go.id/> dan <https://www.lph-ipb.id/>.
- f) Aplikasi LPH diwajibkan agar kedepannya LPH dapat mengembangkan secara mandiri data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan LPH



Gambar 13. Koordinasi sistem integrasi dengan tim IT BPJPH

- Melakukan Pelatihan alur sertifikasi halal

Pelatihan Alur sertifikasi halal untuk para personel LPH BBPSI Pascapanen Pertanian dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan nara sumber Bapak Dading Haryo dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku Analis Standar Halal. Proses sertifikasi halal sudah tidak lagi dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun dikelola oleh BPJPH di

bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Apabila terdapat produk yang sudah mendeklarasikan halal namun tidak memiliki sertifikasi halal, maka produk tersebut belum bisa dinyatakan sebagai produk halal. Kewajiban untuk sertifikasi halal berlaku WAJIB bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan. Penyesuaian regulasi dalam layanan sertifikasi halal berdasarkan UU No. 6 tahun 2023.

- Penjajakan calon klien pelaku usaha sertifikasi mutu beras  
Kegiatan penjajakan calon klien usaha sertifikasi mutu beras dicalon klien untuk sertifikasi mutu beras sedang dilakukan dengan lokasi pelaku usaha penggilingan padi di daerah pamijahan dan lampung. Kegiatan pemeriksaan awal di LSPro BBPSI Pascapanen akan menggunakan auditor dari luar sebagai lead auditor dengan didampingi auditor magang dari BBPSI Pascapanen. Hal yang sama akan dilakukan metode yang untuk RL lainnya sesuai dengan RL dari LSPro yang sudah ditetapkan. Kedepannya proses penjajakan akan ditiadakan dan diganti dengan promosi dengan media sosial agar klien yang mendatangi LSPro untuk sertifikasi sesuai RL
- Melakukan diskusi dan koordinasi sistem integrasi dengan BPJPH  
Status akreditasi LPH saat ini sedang menunggu hasil penilaian asesmen dari BPJPH (Hari ini dilakukan rapat hasil asesmen). LPH baru bisa beroperasi jika sudah terakreditasi, status akreditasi baru diberikan oleh BPJPH jika layanan di BBPSI Pascapanen Pertanian sudah terintegrasi dengan aplikasi SiHalal BPJPH. Persyaratan yang belum terpenuhi adalah melakukan integrasi layanan pemeriksa halal dari LPH BBPSI Pascapanen Pertanian dengan aplikasi SiHalal BPJPH.
- Koordinasi internal kegiatan LSPro  
Koordinasi internal kegiatan LSPro dilakukan dalam rangka merencanakan kegiatan tahap berikutnya pada Tahun 2024 yang akan dilaksanakan terkait operasionalisasi LSPro dan LPH. Untuk lingkup produk yang akan diambil oleh LSPro Pascapanen antara lain Beras, Gula, Sereal dan Pertanian organik.
- Audit halal ke Pelaku Usaha jasa Penyembelihan

LPH BBPSI Pascapanen Pertanian telah 3 kali melakukan audit pemeriksaan halal dalam rangka sertifikasi halal yang diajukan oleh Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Unggas (TPU) antara lain CV Fadilah, Ciseeng Kabupaten Bogor; CV Sukro Group, Pondok Gede, Bekasi dan PT Mustapa Jaya Mandiri, Bojong Gede Kabupaten Bogor. Kegiatan pemeriksaan halal dilakukan dengan melibatkan 1 orang Sumber Daya Manusia Syariah (SDM Syariah) LPH BBPSI Pascapanen yaitu Ustad Obay Sobari, Sag, MPd, CT.CPS CDAI dan Ustad Dr. Zahid Mubarak, ST.I M.E.I serta 1 orang perwakilan anggota komisi fatwa MUI yang ditugaskan oleh MUI yaitu Lukmanul Hakim, Pd.D, dan Dr. Marhadi Muhayar, Lc. MA untuk bersama-sama melakukan proses pemeriksaan penyembelihan di RPU tersebut. Kegiatan pemeriksaan halal dilakukan selama 1 hari, dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dimiliki pelaku usaha, dokumen surat ijin berusaha (NIB), dokumen juru sembelih halal (juleha), dokumen penyelia halal, dokumen lainnya terkait implementasi SJPH di pelaku Usaha.



Gambar 14. Kegiatan audit/pemeriksaan halal

vi) *Pengelolaan Sekretariat Mirror Committee Codex*

Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp8.012.500,- (8,01%) dan realisasi fisik sekitar 28%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi Standar Batas Maksimum Cemar Kimia dan Biologi terkait Pemasukan & Pengeluaran



Gambar 15. Koordinasi batas maksimum cemaran kimia dan biologi

- Koordinasi Komtek dengan Badan Standardisasi Nasional



Gambar 16. Koordinasi dengan BSN

- Pembahasan Posisi Indonesia untuk Sidang CCCF ke 17
- Sinkronisasi Data Residu Codex dengan PSP
- Pembahasan Perluasan Ruang Lingkup Komtek 65-22 terkait Mikrobiologi, BBPSI Pascapanen mengusulkan penambahan ruang lingkup terkait cemaran mikrobiologi dan logam berat. BBPSI Pascapanen mengusulkan penambahan ruang lingkup terkait cemaran mikrobiologi dan logam berat dengan justifikasi :
  - a. Batas cemaran kimia (selain residu pestisida) pada pangan segar untuk logam (SNI 7384:2009);
  - b. Batas cemaran mikrobiologi pada pangan (SNI 7388:2009) telah dicabut dan saat ini belum ada standar batas cemaran penggantinya.

- c. Dalam rangka penjaminan keamanan pangan masyarakat, standar keamanan pangan untuk batas cemaran logam berat maupun mikrobiologi pada pangan segar hasil pertanian perlu ditetapkan.
  - d. BBPSI Pascapanen memiliki laboratorium penunjang yang memadai dalam menyusun standar tersebut.
- Capacity Building Codex Indonesia
    1. Agenda 1: CAC dan penanganannya di Indonesia
    2. Agenda 2: Overview Prinsip Dan Prosedur Manajemen Risiko Dalam Pengembangan Maksimum Level
    3. Agenda 3: Best Practice Pengusulan New Work Pengembangan Standar Di Forum Codex
    4. Agenda 4: Sharing Pengalaman: Pengusulan New Work Pengembangan Standar Codex



Gambar 17. Capacity building codex

- Pembahasan Standar Batas Maksimum Cemaran Keamanan Pangan PSAT Impor, bertujuan untuk merevisi Permentan no 55 tahun 2016, Permentan no 55 tahun 2016 hanya menuliskan secara global dan tidak mengakomodir variasi bentuk dari komoditas tersebut. Standar dengan nilai terkecil biasanya bersumber dari Standar Eropa, alasan digunakan dengan nilai terkecil adalah untuk melindungi konsumen Indonesia; 3) Pelaksanaan Sidang Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) ke 55, 1. Sidang CCPR ke-55 merupakan rapat komite bidang masalah terkait



residu pestisida dalam sidang Codex pada tahun 2024, Tujuan utama dari sidang CCPR ke-55 adalah menetapkan batas maksimum residu pestisida pada pangan dan pakan.

### **3.1.2 Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian**

Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 30 Juni 2024 masih Rp 0 (0%) dikarenakan masih adanya pemblokiran anggaran. Namun realisasi fisik sudah mencapai sekitar 30%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Untuk perumusan PNPS Pascapanen tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan mengumpulkan/kompilasi informasi terkait topik calon PNPS 2024 yang tidak diajukan proses RSNI tahun 2024 dari tim kegiatan sebelumnya. Dari kegiatan ini diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa calon PNPS 2024 dengan topik bunga krisan potong dan infestasi kutu pada beras.
- Telah dilakukan rapat internal tim kegiatan PNPS 2024 menghasilkan 9 judul/topik usulan PNPS Pascapanen Pertanian Tahun 2025. Usulan PNPS diambil 2 topik dari setiap komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), yaitu:
  - (1) tanaman pangan (i) deteksi infestasi kutu beras; (ii) proses berasan jagung;
  - (2) hortikultura: (i) penanganan krisan; (ii) proses pengeringan cabe;
  - (3) perkebunan: (i) penanganan pala; (ii) penanganan lada
  - (4) peternakan: (i) penanganan susu kambing; (ii) penanganan daging domba/kambing
- Dalam rangka menambah data/informasi untuk mendukung topik usulan PNPS pascapanen pertanian, tanggal 21 Juni 2024 telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat PPH komoditas setiap Ditjen teknis lingkup Kementan. Sejumlah topik usulan yang diperoleh yang berhubungan dengan kegiatan eksisting di direktorat antara lain:
  - (1) tanaman pangan: proses pati umbi-umbian (akomodir ubi jalar, singkong); proses ampok/berasan jagung
  - (2) hortikultura. Adanya SOP/GAP dapat dinaikkan menjadi SNI penanganan dan pengemasan pada komoditas cabe, bawang, durian, manga gedong

gincu

- (3) perkebunan: BMR spesies hasil perkebunan; proses penurunan mikotoksin hasil perkebunan; adopsi ketertelusuran kakao, karet, kopi, dan sawit.
- (4) peternakan: proses penanganan susu; proses penanganan madu; proses tepung telur; proses penanganan sarang burung walet; proses telur asin; proses keju mozzarella.



Gambar 18. Koordinasi ke direktorat PPH

### 3.1.3 Layanan Pengujian Mutu Instrumen Pascapanen Pertanian

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) memiliki tugas dan fungsi salah satunya melakukan pengujian dan penilaian kesesuaian instrumen pascapanen pertanian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2023. BBPSI Pascapanen Pertanian dilengkapi dengan fasilitas laboratorium pengujian (LP-366-IDN) dan laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP-024-IDN) yang telah diakreditasi KAN untuk beberapa ruang lingkup.

Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, meliputi laboratorium Kimia, Fisika, Nanoteknologi, Mikrobiologi, serta laboratorium uji mutu gabah dan beras didukung oleh peralatan pengujian yang lengkap dan personel yang kompeten. Parameter dan matriks ruang lingkup akreditasi terdiri dari analisis proksimat (matriks susu bubuk dan biskuit), kadar amilosa (matriks tepung beras), partikel size analyzer (matriks cairan), kekentalan pati Rapid Visco analyzer (matriks bahan berpati), residu pestisida untuk malation dan klorfirifos (matriks sayur dan buah), Angka

Lempeng Total (matriks teh dan tepung) serta mutu gabah dan beras.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan laboratorium pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian dilakukan dengan mengacu pada panduan pembentukan kelembagaan internal dan panduan mutu yang ditetapkan dalam SNI ISO/ISE 17025:2017. Pengelolaan dan pengembangan laboratorium merupakan kegiatan manajerial dan teknis yang meliputi:

- Penyelenggaraan layanan pengujian
- Peningkatan, Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas laboratorium
- Pengembangan/update metode uji
- Pemeliharaan status dan perluasan ruang lingkup akreditasi
- Pertemuan implementasi sistem mutu
- Peningkatan kompetensi SDM laboratorium
- Promosi
- Penyelenggaraan layanan pengujian

Layanan jasa pengujian diberikan kepada pengguna internal (lingkup BBPSI Pascapanen Pertanian) dan pengguna eksternal (institusi pemerintah dan swasta, termasuk mahasiswa). Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja layanan jasa pengujian adalah jumlah sampel yang ditangani, jumlah LHU yang diterbitkan, jumlah PNBP yang diterima dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan laboratorium pengujian.

### **3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan kegiatan perumusan RSNI yang sedang dilakukan berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat diajukan, antara lain:

- Penanggungjawab dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan telah dibukanya blokir anggaran
- Tim Komtek dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun usulan PNPS dan hal hal terkait Komtek 65-22.
- Komtek Pascapanen segera melaksanakan rapat teknis sehingga pembahasan RSNI dapat segera dilperecepat
- LS Pro BBPSI Pascapanen Pertanian segera mencari calon klien untuk disertifikasi

serta satu mitra untuk witness sehingga LS Pro bisa segera memperoleh sertifikat akreditasi.

## BAB IV KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

### 4.1. Evaluasi Aplikasi Monev Online

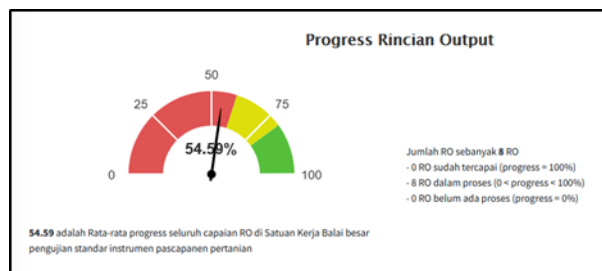
Terdapat 4 aplikasi monev online yang dilaporkan setiap bulan dari setiap satker di BSIP. Sampai dengan akhir Juni 2024 berikut perkembangan laporan aplikasi monev online untuk kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian:

#### 4.1.1 Aplikasi SMART-DJA

Sampai dengan akhir Juni 2024, capaian Nilai Kinerja Anggaran SMART BSIP Pascapanen Pertanian untuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2,35% dan untuk Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 35,14%, dengan rincian: a) Revisi DIPA 10%, b) Deviasi Hal 3 DIPA 13,55%, c) Penyerapan Anggaran 17,7%, d) Belanja Kontraktual 10%, e) Penyelesaian Tagihan 10%, f) Pengelolaan UP dan TUP 10%, g) Dispensasi SPM 0%, dan Capaian Ouput 0%.

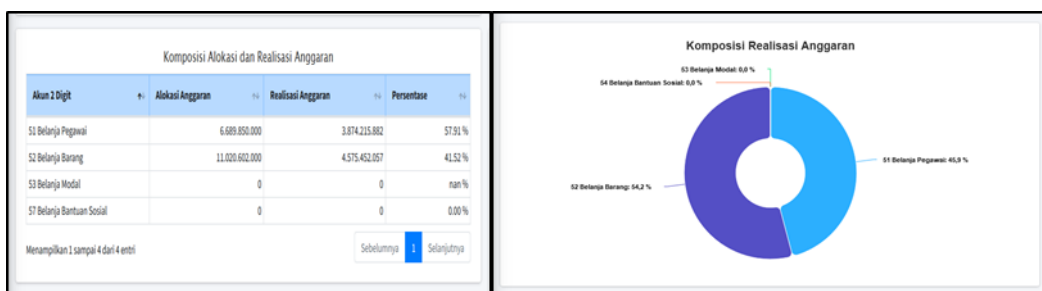


Gambar 26. Dashboard aplikasi SMART-DJA



Gambar 27. Tabel progres Rincian Output pada aplikasi SMART-DJA

Berdasarkan aplikasi SMART-DJA, komposisi alokasi dan realisasi anggaran di BSIP Pascapanen sampai dengan akhir Juni 2024, persentase realisasi anggaran terhadap alokasinya per jenis belanja sebagai berikut: belanja pegawai (45,9%), belanja barang (54,2 %), dan belanja modal(0%), dengan progress capaian output 54,59%



Gambar 28. komposisi realisasi anggaran pada aplikasi SMART-DJA

Pada aplikasi SMART-DJA juga terlihat komposisi realisasi anggaran di BSIP Pascapanen sampai akhir Juni 2024, dari total realisasi anggaran, sekitar 45,0% untuk belanja pegawai dan 54,2% untuk belanja barang, sedangkan belanja modal masih 0%.

#### 4.1.2 Aplikasi e-monev Bappenas

Realisasi anggaran pada aplikasi emonev Bappenas sekitar 43,88%, dengan realisasi pada kegiatan komponen Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian (9,2%), kemudian pelaporan komponen Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian dengan rincian keuangan sebesar Rp7.466.449.622,00 (46,7%). Presentase kemanfaatan sebesar 20%.



Gambar 29. Dashboard aplikasi e-money Bappenas

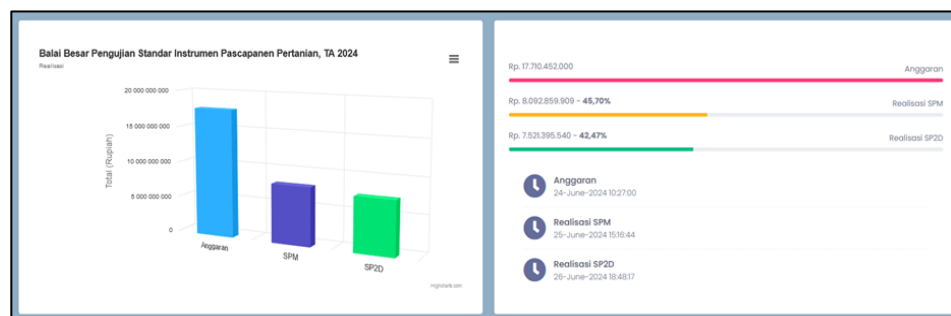
Pada aplikasi e-money Bappenas, di dashboard terlihat bahwa nilai persentase sebaran kategori pelaksanaan setiap kegiatan sebagian besar masih dalam tahap perencanaan (0%), persiapan (0%), pelaksanaan (90%), selesai (0%), dan belum dilaporkan (0%).

Kode & Nomenkelatur	Pelaksanaan (% kumulatif)	Anggaran			%	Kelengkapan											
		Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
6916 Pengalokasian Standar Instrumen Pertanian	20.5%	1,200,000,000	109,851,200	9.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	76.1%	16,410,452,000	7,661,449,622	46.7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Gambar 30. Tabel realisasi anggaran pada aplikasi emoney Bappenas

### 4.1.3 Aplikasi e-money BSIP

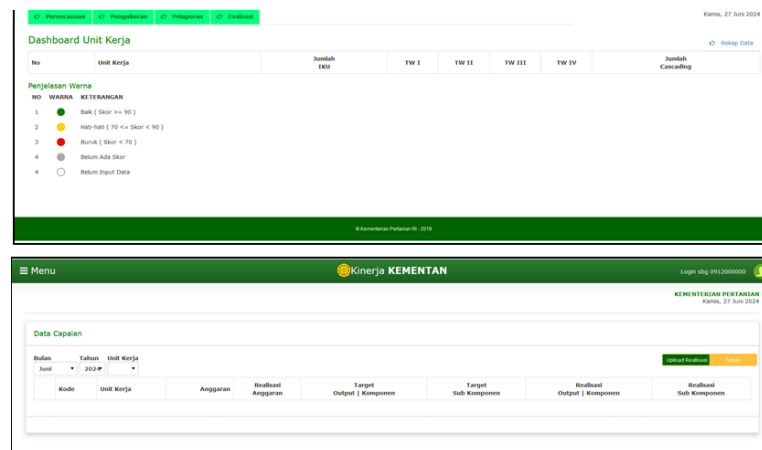
Pada aplikasi ini, realisasi anggaran BSIP Pascapanen hingga akhir Juni 2024 dengan rincian realisasi SPM sebesar Rp 8.092.859.909,00 (45,70%), realisasi SP2D sebesar Rp 7.521.395.540,00 (42,47%), dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 40%.



Gambar 31. Dashboard aplikasi e-money BSIP

#### 4.1.4. Aplikasi e-sakip Kementan

Sampai dengan akhir Juni 2024, aplikasi esakip Kementan belum dapat diisi, karena masih dalam proses pembaharuan/pengembangan. Dalam aplikasi ini akan melaporkan capaian kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BSIP Pascapanen, yaitu PK level 2 (KaBB) dan level 3 (Kabag TU).



Gambar 32. Tampilan aplikasi e-monev BSIP

#### 4.1.5. Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran)

Hingga triwulan II, BBPSI Pascapanen dengan anggaran sebesar Rp 17.710.452.000 telah ter realisasi sebesar Rp 7.771.300.822. Selama TA. 2024, sampai dengan akhir Juni 2024, DIPA BBPSI Pascapanen mengalami revisi sebanyak 8 (delapan) kali. Revisi POK ke 1 pada tanggal 22 Desember 2022. Revisi kedua pada tanggal 23 Februari 2024, dengan pagu anggaran sebesar Rp17.549.452.000,00 . Revisi ketiga pada tanggal 10 Februari 2024, merupakan revisi POK, dengan pagu anggaran tetap. Revisi keempat pada tanggal 15 Februari 2024, realokasi anggaran dengan pagu anggaran menjadi Rp17.510.452.000,00. Revisi kelima pada tanggal 4 April 2024, dengan pagu anggaran menjadi Rp17.610.452.000,00. Revisi keenam pada tanggal 22 April 2024 pergeseran akun dengan pang anggaran tetap. Revisi ketujuh tanggal 29 Mei revisi halaman III Dipa dengan pagu anggaran tetap dan revisi kedelapan buka blokir Program Teknis, PNPB dan penambahan anggaran pada subkomponen monitoring program strategis Kementan dengan total pagu anggaran menjadi Rp 17.710.452.000.

Belanja dalam rangka operasional kegiatan BBPSI Pascapanen dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya seluruh kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Komposisi pagu anggaran BSIP Pascapanen disajikan pada tabel 3. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai Rp6.689.850.000,00 (38,2%), belanja barang Rp11.020.602.000,00 (58,6%), belanja PNPB Rp572.706.000,00 (3,2%). Pada Tabel 3 disajikan Realisasi anggaran (SP2D) sampai dengan 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp7.771.300.822,00 (43,88%), dengan realisasi per jenis belanja yaitu belanja pegawai Rp3.476.098.765,00 (51,96%), belanja barang Rp4.295.202.052,00 (38,97%), dan belanja PNPB sebesar Rp,- (0%). Belanja PNPB masih belum dilaksanakan karena kondisi anggaran masih diblokir dan masih dalam pembahasan untuk pembukaan blokir tersebut.

Tabel 3. Realisasi anggaran TA. 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 berdasarkan jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s/d 30 Juni 2024	
		Rp	%
Belanja pegawai	6.689.850.000,00	3.476.098.765,00	51,96
Belanja barang	11.020.602.000,00	4.295.202.052,00	41,1
PNPB	572.706.000,00	-	-
<b>Total</b>	<b>17.710.452.000,00</b>	<b>7.771.300.822,00</b>	<b>43,88</b>

#### 4.1 Evaluasi Kegiatan Manajemen Kinerja Internal:

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp7.661.449.662,00 (48,07%) dan realisasi fisik sekitar 54,96%.

##### i) *Layanan Pelaksanaan Barang Milik Negara (BMN)*

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp13.052.000,00 (17,40%) dan realisasi fisik sekitar 45%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan meliputi urusan tata kelola surat



menyurat, kearsipan, pelayanan agenda rapat dinas: rapat internal/Koordinasi Tim Kerja TU & RT (Koordinasi Tim Satpam), pelayanan komunikasi oleh operator, tata kelola perawatan kebersihan gedung dan lingkungan, serta pengendalian keamanan kantor

- Terlaksananya pelayanan perlengkapan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana/aset kantor Bogor dan Karawang, Inventarisasi BMN, tindak lanjut pemindahtanganan BMN RMU (SK penetapan panitia hibah RMU, surat penetapan panitia hibah RMU ke Sekretariat BSIP, BBPSI SDLP, Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumsel dan surat koordinasi dan konsolidasi BMN ke Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumsel), Bimtek Implementasi SIMAN V2.

## ii) *Layanan Umum*

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar 62% dengan realisasi fisik sekitar Rp97.853.000,00 (37,94%).

### a. Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 30 Juni 2024 Rp35.869.000 (54,11%) dan realisasi fisik sekitar 65%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Mendampingi proses audit kinerja Inspektorat Jenderal
- Koordinasi kelembagaan dan penyelesaian administrasi di laboratorium karawang
- Mengikuti Koordinasi lingkup BSIP dalam menindaklanjuti arahan menteri Pertanian pada Musrembangtan 2024
- Peningkatan kapasitas dan kebersamaan pegawai melalui olahraga bersama dan pengajian rutin
- Mengkoordinasikan tindak lanjut LHP audit kinerja
- Mengikuti koordinasi penyelamatan arsip eks Balitbangtan
- Mengikuti sidang etik pegawai lingkup BSIP
- Pelaksanaan Surveilans tahap ISO 17043:2010 oleh Asesor dari KAN dilaksanakan tanggal 4-6 Maret 2024 di dilaksanakan di Bogor dan laboratorium mutu beras Karawang
- Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Lingkup BSIP, yang dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 3 kantor pusat BSIP Jakarta pada tanggal 4

Maret 2024

- Rapim B Diperluas Lingkup BSIP, yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 kantor pusat BSIP Jakarta pada tanggal 4 Maret 2024
- Pengawasan Kegiatan Tahun 2024/Pendampingan SPI oleh Inspektorat 4 Itjen Kementan pada tanggal 14-20 Maret 2024
- Koordinasi penilaian ZI WBK/WBBM lingkup BSIP, yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 26 Maret 2024

b. Layanan Informasi Publik

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 30 Juni 2024 Rp35.758.500,00(71,52%) dan realisasi fisik sekitar 71%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik sudah dilaksanakan pada 3 Juni 2024
- Updating informasi publik pada website untuk LHKPN, dan IKM Triwulan 2 dan IKM Semester 1 2024 sudah diunggah di website
- Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pemeringkatan KIP Lingkup Kementan pada tanggal 26 Juni 2024



Gambar 19. Sosialisasi KIP lingkup Kementan

- Penyusunan Laporan PPID hingga bulan Juni
- Daftar Informasi Publik 2024 sudah disahkan oleh Kepala Balai Besar
- Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2024 sudah dikirimkan ke PPID Utama dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada tanggal 5 Maret 2024

- Studi Banding PPID ke Balai Embrio Ternak Cipelang sudah dilaksanakan pada 7 Maret 2024
- Penyusunan laporan bulanan PPID periode Januari-Juni 2024

Tabel 1. Daftar Permohonan Informasi Publik Bulan Juni, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun 2024

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaman Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
1	3 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	Tuti	Konter Layanan	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon</b>	Informasi Teknologi CAS	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan
		<b>Usia*</b>	41-50		<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
		<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Swasta		<b>Status</b>	Selesai		
2	25 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	Setyadi Gumaran	Konter Layanan	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon</b>	Prosedur Magang MBKM	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan
		<b>Usia*</b>	31-40		<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Waktu Pelayanan</b>	1 hari
		<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Swasta		<b>Status</b>	Selesai		
3	25 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	Nauroh Tsabitah	Konter Layanan	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon</b>	Prosedur Magang/PKL	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan
		<b>Usia*</b>	<21		<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
		<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Mahasiswa		<b>Status</b>	Selesai		
4	25 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	Anisa Safitri	Konter Layanan	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon</b>	Informasi Magang/PKL	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan
		<b>Usia*</b>	<21		<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
		<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Mahasiswa		<b>Status</b>	Selesai		
5	25 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	Yana Nurochman	Konter Layanan	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan</b>	Informasi Magang/PKL	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan

		<b>Usia*</b>	21-30		<b>pemohon</b>		<b>Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
		<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Mahasiswa		<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Status</b>	Selesai
<b>6</b>	25 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	Jimmy M Alpino	Konter Layanan	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon</b>	Informasi Magang/PKL	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan
		<b>Usia*</b>	<21		<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
		<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Mahasiswa				<b>Status</b>	Selesai
<b>7</b>	25 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	Susta Naelly	Konter Layanan	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon</b>	Informasi Magang/PKL	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan
		<b>Usia*</b>	<21		<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
		<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Mahasiswa				<b>Status</b>	Selesai
<b>8</b>	26 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	Tri Indahwati	Email	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon</b>	Prosedur Analisa	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan
		<b>Usia*</b>	41-50		<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
		<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Swasta				<b>Status</b>	Selesai
<b>9</b>	26 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	John Edy Kennedy	Konter Layanan	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon</b>	Prosedur Kerjasama	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan
		<b>Usia*</b>	>50		<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
		<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Swasta				<b>Status</b>	Selesai
<b>10</b>	27 Juni 2024	<b>Nama Pemohon</b>	Mazaya Alyssa	Konter Layanan	<b>Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon</b>	Informasi Magang/PKL	<b>Tindak Lanjut Petugas</b>	Diberikan

<b>Usia*</b>	<21	<b>Kategori Informasi*</b>	Pertanian	<b>Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
<b>Pekerjaan/ Instansi</b>	Mahasiswa			<b>Status</b>	Selesai

c. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian)

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 30 Juni 2024 Rp26.225.500,00 (25,22%) dan realisasi fisik sekitar 50%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Usulan Kenaikan Pangkat TMT Februari 2024 sebanyak 4 orang
- Usulan proses pensiun 2024 yang akan diproses sebanyak 4 orang
- Telah dilaksanakan Rekonsiliasi pemangku jabatan TMT Februari 2024
- Rapat koordinasi penyusunan SKP baru
- Rapat penyusunan MPH
- Pertemuan Sosialisasi Honorer BBPSI Pascapanen Pertanian sebanyak 50 orang
- Telah terbit SK Kenaikan Gaji Berkala;

d. Layanan Pengelolaan PNB (Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium)

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 30 Juni 2024 dan realisasi fisik masih nol dikarenakan masih diblokir, namun capaian fisik telah mencapai 55%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Penerbitan Lembar Hasil Pengujian (LHU) Pada bulan Juni 2024, Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian telah menerbitkan 50 Lembar Hasil Pengujian (LHU);
- Koordinasi Lab Penguji 17025, koordinasi laboratorium pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian terkait progress dan permasalahan yang dihadapi di laboratorium, perlu adanya pembaharuan struktur organisasi, perlu adanya suplemen tambahan untuk analisis, serta belum tercapainya evaluasi sasaran mutu LPK yaitu Lead Auditor untuk LSPro;
- Persiapan Uji Profisiensi, dalam rangka implementasi sistem mutu SNI ISO/IEC 17043:2023 BBPSI Pascapanen Pertanian akan menyelenggarakan Uji Profisiensi pada tahun 2024 dengan matriks beras dan parameter uji meliputi kadar air, butir patah, butir kepala, kadar amilosa dan derajat sose;
- Telah dilakukan rapat koordinasi pelaksanaan Bimtek UP 2024;
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Uji Profisiensi yang terdiri pemaparan materi dan praktik terkait mutu beras fisik dan analisa kadar amilosa;
- Kuliah Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), telah

dilaksanakan sebanyak tiga pertemuan diantaranya: a) Kuliah umum budaya kerja dan etika, b) penanganan proses pascapanen daun rajang kering talas beneng, c) pengenalan bahan dan praktek metodologi analisis nutrisi pangan;

- Penerimaan mahasiswa MBKM dari Universitas Bengkulu, Mahasiswa akan melaksanakan magang praktek kerja di Laboratorium Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
- Pelaksanaan audit halal LPH BBPSI Pascapanen Pertanian, Pada bulan Juni ini telah dilakukan audit untuk 3 pelaku usaha yaitu: a) CV. Fadillah Chicken Jasa Penjualan, b) CV. Sukro Group Jasa Penjualan, d) PT. Mustapa Jaya Mandiri Jasa Penjualan;
- Sidang Fatwa MUI, Sidang Fatwa MUI LPH Pascapanen pertama dilaksanakan Juni 2024 untuk mereview hasil audit yang telah dilaksanakan oleh LPH Pascapanen ke CV. Fadillah Chicken, CV. Fadillah Chicken adalah jasa penjualan yang sudah mengikuti prosedur halal thoyiban dengan baik, sehingga layak untuk mendapatkan sertifikat halal;
- Penjajakan kerjasama PT. OASIS, terkait pemanfaatan Biotani Process Machine yang ada di Laboratorium Mutu Beras dan pascapanen Sereal Karawang;
- Penjajakan kerjasama dengan Lab Ciracas, sebagai LSPro dan Lembaga Pemeriksa Halal, BBPSI Pascapanen Pertanian melakukan penjajakan kerja sama dengan Balai Pengujian Mutu Barang Kementerian Perdagangan RI. Kerjasama tersebut memiliki ruang lingkup jasa pengujian Residu Pestisida, Logam Berat, Kehalalan Produk, dan pengujian lainnya pada komoditi pertanian;
- Penjajakan kerjasama dengan laboratorium BBPSI Padi, Ruang lingkup perjanjian kerja sama adalah Kerja Sama Subkontrak tentang "Pengujian Mutu Kimia serta Mutu Fisik Gabah dan Beras
- Penerbitan 141 Lembar Hasil Pengujian (LHU) Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian yang terdiri dari 80 Lembar Hasil Pengujian (LHU) yang diterbitkan di laboratorium pengujian Bogor dan 61 Lembar Hasil Pengujian (LHU) yang diterbitkan di laboratorium pengujian Karawang;
- Tindak Lanjut Surveilans ke-2 Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen



Pertanian (SNI ISO/IEC 17025:2017). Surveilan ke-2 Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian (SNI ISO/IEC 17025:2017) telah dilaksanakan pada tanggal 26-27 Februari 2024. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, dilakukan perbaikan terhadap 24 temuan ketidaksesuaian kategori 2 dan 1 temuan observasi (aspek teknis). Pembagian temuan terdiri dari 4 aspek manajemen dan 21 aspek teknis (10 Bogor, 11 di Karawang). Perbaikan temuan sudah disampaikan kepada tim asesor yang terdiri dari Tri Pratiwi (Asesor Kepala/ Asesor Teknis Mikrobiologi), Kikin Hamzah Mutaqin (Asesor Anggota/ Asesor Teknis Fisik), dan Herawati (Asesor Anggota/ Asesor Teknis Kimia) untuk direview sebelum diupload ke KANMIS.



Gambar 20. Tindak Lanjut Surveilan ke-2

- Re-akreditasi Laboratorium PUP BBPSI Pascapanen Pertanian (SNI ISO/IEC 17043:2023)

Re-akreditasi Laboratorium PUP BBPSI Pascapanen Pertanian (SNI ISO/IEC 17043:2023) dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 5-6 Maret 2024 bertempat di Aula Rapat Lantai 2 BBPSI Pascapanen Pertanian-Bogor (5 Maret 2024) dan Aula Inlit Karawang (6 Maret 2024). Asesor yang akan menilai ada dua, yaitu Herlin Rosdiana (Asesor Kepala/QMS) dan Amiyarsi Mustika Yukti (Asesor anggota/ Asesor PUP lingkup Pertanian). Penyusunan naskah Kerjasama dengan Laboratorium Balai Pengujian Mutu Barang dengan ruang lingkup pengujian residu pestisida dan logam berat.



Gambar 21. Re-akreditasi Laboratorium PUP BBPSI Pascapanen Pertanian (SNI ISO/IEC 17043:2023)

- Penyusunan naskah Kerjasama PT. Laborindo  
Telah dilakukan rapat koordinasi penyusunan naskah Kerjasama antara PT. Laborindo Sarana (Pihak Kesatu) dengan BBPSI Pascapanen Pertanian (Pihak Kedua) tentang uji coba alat Perten Paddycheck 6800. Ruang lingkup kerjasama ini adalah uji coba alat Perten PaddyCheck 6800 menggunakan sampel gabah yang dilakukan di Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealial Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.
- Penerimaan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- Penyusunan naskah Technical Cooperation Project (TCP) dengan Biotanah  
Telah dilakukan rapat koordinasi penyusunan naskah Technical Cooperation Project (TCP) antara BBPSI Pascapanen/ Kementerian Pertanian – Indonesia (Pihak Kesatu) dengan BioTanah/ Perancis (Pihak Kedua) tentang “The Establishment and Development of Sustainable Agriculture in Indonesia”. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Ketua Kelompok Layanan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian, Perwakilan dari BSIP Mektan, dan Direktur BioTanah.



Gambar 22. Penyusunan naskah Technical Cooperation Project (TCP) dengan Biotanah

Tabel 2. Pelaksanaan audit halal BBPSI Pascapanen

No.	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Ruang Lingkup	Tim audit
1	CV. Fadilah Chicken	Kp. Sinagar, Desa Putat Nutug, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor	Jasa Penyembelihan	Miskiyah, SPT, MPt, Ermi Sukasih, STP, Msi, Lukmanul Hakim, Ph.D (Komisi Fatwa MUI), Obay Sobari, Sag,MPd.CT.CPS.CDAI (SDM Syariah)
2	CV. Sukro Group	Taman Pondok Gede, Desa Jatirahayu, Kec. Pondokmelati, Kota Bekasi	Jasa Penyembelihan	Miskiyah, SPT, MPt, Dr. Winda Haliza, Dr. H. Marhadi Muhayar, Lc.,M.A. (Komisi Fatwa MUI) , Dr. Zahid Mubarok, S.Th.I,M.E.I (SDM Syariah)
3	PT. Mustapa Jaya Mandiri	Kp. Pondok Manggis, Desa Bojongbaru, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor	Jasa Penyembelihan	Miskiyah, SPT, MPt, Kirana SS, STP, Msi Lukmanul Hakim, Ph.D (Komisi Fatwa MUI), Obay Sobari, Sag.MPd.CT.CPS.CDAI (SDM Syariah)

iii) *Layanan Perkantoran*

Realisasi anggaran kegiatan telah mencapai Rp7.216.334.267,00 (48,61%), dengan capaian fisik sebesar 55,25%.

- a. Gaji dan Tunjangan: realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp3.476.098.765,00 (51,96%) dan realisasi fisik sekitar 58%, dengan perkembangan kegiatan berupa pembayaran gaji dan tunjangan hingga bulan Juni 2024.

- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor: realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp3.740.235.502,00 (45,86%) dan realisasi fisik sekitar 52.50%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut
- Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp667.751.611,00 (7.25%) dipergunakan untuk:  
Pembelian ATK, bahan pendukung komputer, bahan kimia, konsumsi rapat, langganan surat kabar dan bahan pendukung lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hingga bulan Juni 2024 kegiatan fisik perkantoran di Bogor dan Laboratorium Mutu Beras Karawang.
  - Langganan daya dan jasa sebesar Rp364.243.244,00 (25,11%) dipergunakan untuk kegiatan pembayaran langganan daya dan jasa telah dilaksanakan yaitu untuk langganan Listrik PLN, langganan telepon, langganan air PDAM dan gas hingga bulan Juni 2024 yang mencakup kantor Bogor dan Laboratorium Karawang
  - Pemeliharaan perkantoran sebesar Rp483.241.676,00 (15,87%) dipergunakan untuk:
    - Perbaikan perbaikan pagar Laboratorium Mutu Beras Karawang
    - Lanjutan Perbaikan Plafon Laboratorium Mutu Beras Karawang
    - Pengecatan Pagar Kantor Bogor
    - Persiapan Perbaikan Ruang Pimpinan
    - Perbaikan atap dan plafon Laboratorium Pengolahan
    - Perawatan dan bahan bakar mesin potong rumput di kantor Bogor dan Laboratorium Karawang;
    - Perawatan kendaraan roda 2, 3, 4 di kantor Bogor dan Laboratorium Karawang.
    - Perawatan AC
    - Perawatan instalasi listrik dan komputer
  - Pembayaran terkait operasional kantor yang dipergunakan untuk:
    - Pembayaran honor pengemudi non PNS bulan hingga bulan Juni 2024
    - Pembayaran honor satuan pengamanan kantor non PNS hingga bulan Juni 2024
    - Pembayaran honor tenaga pramu bakti dan kebersihan non

PNS hingga bulan Juni 2024

- Pembayaran honor Satuan Kerja hingga bulan Juni 2024
- Pelaksanaan untuk pengadaan seragam dinas pegawai (Seragam Senin, Kamis)

i) *Penyusunan Rencana Program dan Anggaran*

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp143.382.605,00 (36,3%) dan realisasi fisik sekitar 71%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan Program dan Anggaran, realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp43.975.500,00 (27,48%) dan realisasi fisik sekitar 77%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Tersusunnya perencanaan program dan anggaran pascapanen pertanian sesuai kebutuhan pengguna yang mendukung kebijakan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan program strategis Kementerian Pertanian:
  - Koordinasi Penelaahan Usulan Revisi Anggaran BSIP 2024
  - Koordinasi Pembukaan Blokir Tahun 2024
  - Kerangka Kelembagaan BSIP
  - Koordinasi Pengelolaan & Pemanfaatan Hasil Standardisasi Instrumen dan ATB
  - Koordinasi Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025
  - Perbaikan Standar Biaya Keluaran (SBK) Hasil Telaah II
  - Sosialisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan
  - Koordinasi Pembahasan Proposal Makan Siang Gratis 2025
  - Koordinasi Perluasan Ruang Lingkup 65-22
  - Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan RSNI
  - Musrenbangtannas 2024 dalam Perencanaan Tahun 2025
  - Rapat Koordinasi lingkup Unit Organisasi BSIP
  - Revisi Anggaran Kegiatan Monitoring Program Strategis Kementan
  - Revisi Pembukaan Blokir SPA dan PNBK
  - Entri Data eProposal
  - Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
- Terlaksananya kegiatan DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2024

Pada kurun waktu Januari s.d Juni 2024 BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan 8 kali revisi sehubungan dengan adanya kebijakan di lingkup Kementan maupun dari pemerintah pusat dan adanya pergeseran pada detail antar akun di RKA-K/L.;

- Terlaksananya perencanaan program dan anggaran kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2025
  - Usulan Program Kegiatan Inisiatif Baru BBPSI Pascapanen Pertanian 2025 (a.Rancangan Standar Instrumen Pascapanen, b.Sertifikasi Produk Instrumen Pascapanen Pertanian, c. Bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, d. Peserta Sosialisasi Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, e. Instrumen Mutu Pascapanen yang Diuji);
  - Usulan Anggaran Program Kegiatan Inisiatif Baru BBPSI Pascapanen Pertanian 2025

## 2) Koordinasi Institusional

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp99.407.105,00 (60,99%) dan realisasi fisik sekitar 65%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- koordinasi internal pelaksanaan kegiatan
- Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui Pompanisasi Kabupaten Mamuju Tengah (06 Mei 2024);
- Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui Pompanisasi Kabupaten Mamasa ;
- Kunjungan lapangan ke lokasi Kelompok Tani Ringan yang masuk dalam PAT pompanisasi yang sedang melakukan penanaman seluas 5 ha di desa Rambusaratu, kecamatan Mamasa

### ii) *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi*

#### A. *Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi*

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp29.830.300,00 (39,77%) dan realisasi fisik sekitar 50%, dengan perkembangan kegiatan

sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya Papan skor hingga bulan Juni 2024;
- 2) Tersusunnya Laporan Pengelolaan DUMAS hingga bulan Juni 2024;
- 3) Tersusunnya Laporan Pengelola Gratifikasi hingga bulan Juni 2024;
- 4) Tersusunnya Laporan Benturan Kepentingan hingga bulan Juni 2024;
- 5) Update realisasi keuangan pada aplikasi e-monev hingga bulan Juni 2024;
- 6) Tersusunnya laporan bulanan kegiatan BBPSI Pascapanen hingga bulan Juni 2024;
- 7) Tersusunnya Laporan Matrik KRO RO hingga bulan Juni 2024;
- 8) Penyusunan Matrik Renaksi Kinerja hingga bulan Juni 2024;
- 9) Laporan Monitoring Progres RSNI hingga bulan Juni 2024;
- 10) Laporan triwulan II telah disusun
- 11) Rapat Penyusunan Renaksi Survei Penilaian; Integritas Tahun 2024 lingkup BSIP, Eselon 2 wajib mengisi formulir, rencana aksi dan data responden eksternal, Seluruh ASN harus berkomitmen sehingga tahun 2024 predikat SPI harus hijau. Perbaikan dan identifikasi hasil survey dengan melihat dimensi internal dan eksternal, Banner sudah dipasang tetapi implementasi dan praktek belum dijalankan;
- 12) Penyusunan Rencana Aksi Hasil Survei Penilaian Integritas KPK, Sosialisasi tindak lanjut hasil survey penilaian integritas KPK Tahun 2023 dan Pemahaman terkait SPI KPK, Sosialisasi dan Internalisasi SPIP, Penyusunan MRI kegiatan, Pembuatan Konten dan Penguatan Media (Audio Visual, Poster, Banner, Spanduk) SPI KPK. Rencana aksi yang telah disusun diharapkan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai
- 13) Penyusunan Manajemen Risiko Indeks, sebagai salah satu unsur dalam SPI, yaitu terkait analisis risiko. Setiap pengelola dan penanggungjawab kegiatan perlu melakukan analisis risiko terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya MRI diharapkan setiap risiko maupun kemungkinan risiko yang tidak teridentifikasi terjadi dapat dikendalikan. Dimana masih perlu ditingkatkan implementasinya dalam pelaksanaan kegiatan di UK, Penilaian Frekuensi dan Dampak risiko terhadap

pencapaian tujuan, bagaimana pengendalian agar kegiatan berjalan dengan lancar.

### *B. Monitoring Program Strategis Kementan*

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp138.553.450,00 (69,28%) dan realisasi fisik sekitar 95%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi Penambahan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi  
Pada tanggal 05 - 06 Juni 2024, Kepala BBPSI Pascapanen Pertanian beserta tim BSIP Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar dan Dandim 1402/Polman terkait kegiatan PAT dan Pompanisasi. Selanjutnya dilakukan pengecekan pompa langsung ke lokasi.



Gambar 23. koordinasi penambahan areal tanam





Gambar 24. Pemasangan pompa di kecamatan Budong-budong

- Mengikuti Kunjungan Kerja Menteri Pertanian ke BBPSI Mektan  
Pada Rabu , 12 Juni 2024 Menteri Pertanian melakukan Kunjungan Kerja ke Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) Serpong. Menteri Pertanian mendorong penggunaan teknologi dan mekanisasi secara masif guna menekan biaya produksi secara signifikan sehingga mampu meningkatkan produktivitas secara maksimal. Sebagaimana diketahui, program Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui optimalisasi lahan dan pompanisasi terus digaungkan oleh Kementerian Pertanian sebagai langkah peningkatan produksi dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti kekeringan atau el nino panjang.
- Koordinasi Hibah RMU BSIP
  1. Kegiatan Koordinasi Hibah RMU BSIP kepada Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dilakukan bersama dengan BSIP Sumatera Selatan.
  2. Pada Prinsipnya Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin akan menerima hibah RMU dari BSIP.
  3. Dinas Pertanian meminta agar dilakukan perhitungan nilai aset terlebih dahulu

4. Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin akan memanfaatkan RMU untuk Kelompok Tani



Gambar 25. Koordinasi Hibah RMU

iii) *Manajemen Keuangan*

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp16.865.000,00 (26%) dan realisasi fisik sekitar 40%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan: Telah diterbitkannya Perubahan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran TUP

#### 4.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen di BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya:

- Realisasi keuangan masih rendah dikarenakan beberapa kegiatan mengacu kepada pelaksanaan BSIP dan kegiatan baru berjalan setelah pembukaan blokir anggaran serta beberapa kegiatan yang masih dalam penyelesaian pertanggungjawaban administrasi SPJ.
- Untuk kegiatan pemeliharaan kantor masih belum terlaksanakan karena terkendala cuaca

Adapun beberapa Rekomendasi pemecahan permasalahan diatas diantaranya:

- Percepatan kegiatan internal sehingga penyerapan anggaran juga dapat berjalan cepat,
- Melakukan penjadwalan kegiatan serta rencana aksi kegiatan untuk beberapa bulan ke depan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pada Perjanjian Kinerja TA.2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai beserta masing-masing indikator sasaran/kinerjanya. Untuk sasaran pertama "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun 2024 ini sebanyak 4 Rancangan, sampai dengan Triwulan II telah diperoleh konsep rancangan awal untuk 4 target RSNI yang menjadi output. Konsep RSNI sedang dalam tahap pembahasan dan finalisasi sehingga siap untuk pembahasan dalam Rapat Teknis.
2. Sasaran kedua, "Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82 (Nilai). Sasaran ketiga, "Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai). Balai Besar Pengujian, Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian memperoleh nilai sebesar 80,30 terdiri dari komponen pengungkit sebesar 47,04 dan komponen hasil sebesar 33,26.
3. Permasalahan utama dalam pencapaian target kegiatan adalah adanya blokir anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan agak terhambat. Selain itu ada beberapa kegiatan yang output kegiatan belum tercapai seperti RSNI sehingga komponen hasil masih rendah. Pada akhir tahun diharapkan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaan dan bisa mencapai target. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif dalam mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ke depannya.
4. Total Anggaran DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.710.452.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Layanan Dukungan Manajemen

Internal, Layanan Manajemen Kinerja Internal. Sumber dana berasal dari Rupiah Murni Rp17.137.746.000,00 dan PNBPN sebesar Rp572.706.000,00. Komposisi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis belanja adalah (1) Belanja Pegawai sebesar Rp 6.689.850.000,00 (2) Belanja Barang Rp10.447.896.000,00 Realisasi anggaran berdasarkan pagu efektif per 30 Juni 2024 sebesar Rp 7.771.300.822,00 (43,88%), merupakan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp3.476.098.765,00 (51,96%) dan Belanja Barang Rp 4.295.202.052,00 (38,97%), dan belanja PNBPN sebesar Rp,- (0%).

## **5.2 Saran**

Dengan disusunnya Laporan Triwulan ini, diharapkan adanya perbaikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 dan periode berikutnya. Dengan demikian, Laporan Triwulan ini benar-benar dapat dijadikan rujukan sekaligus pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen.